

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya yang melimpah seharusnya memiliki tujuan serta harapan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan seefisien mungkin. Dengan adanya pemanfaatan potensi secara maksimal, maka pembangunan nasional dapat tercapai seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan pembangunan nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan pembangunan nasional maka pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi yang bertujuan memberikan keleluasaan penuh terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Sejak diterapkan sistem otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah

diharapkan dapat meminimalkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan adanya desentralisasi maka daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya sehingga daerah tersebut mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Menurut Mamesah (1995) menyatakan bahwa kebijakan keuangan daerah dapat diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Usaha peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah.

Industri pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional dan daya serap lapangan kerja di sector industri pariwisata. Dengan adanya pariwisata, tentu akan mendatangkan berbagai dampak diantara lain dampak lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut Salah Wabab yang dikutip oleh Nasrul (2010) dalam bukunya "*Tourism Management*" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas

lainnya. Sebagai sektor kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan atau cindramata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dapat dipandang sebagai industri yang produktif dalam sektor pariwisata.

Sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi penting dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara terencana dan terpadu. Peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdiri dari 26 kabupaten/kota (17 kabupaten, 9 kota) dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Dengan fasilitas umum serta infrastruktur yang memadai pengembangan industri pariwisata di Provinsi Jawa Barat sangatlah positif untuk mendorong pendapatan asli daerah.

Provinsi Jawa Barat memiliki banyak sekali destinasi wisata yang diminati wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, diantaranya Gunung Tangkuban Parahu ialah gunung yang masih aktif hingga saat ini, jika dilihat dari atas Gedung Sate Kota Bandung, bentuk gunung ini terlihat seperti perahu besar yang terbalik, sesuai dengan namanya Tangkuban Parahu yang berarti perahu yang terbalik. Gunung Papandayan ialah gunung api strato yang terletak di Kabupaten Garut, terdapat beberapa kawah yang terkenal oleh wisatawan diantaranya kawah mas, kawah baru, kawah manuk, dan lain-lain, selain itu di Gunung Papandayan wisatawan juga dapat melakukan aktifitas kemah dengan fasilitas yang memadai.

Selain pegunungan Provinsi Jawa Barat juga memiliki Pantai yang memiliki daya tarik luar biasa, seperti Pantai Pangandaran contohnya, berada di Kabupaten Pangandaran pantai ini memiliki berbagai aktifitas wisata seperti water sport, snorkeling, berselancar, atau mengelilingi cagar alam dengan hamparan pasir putih yang indah. Untuk wisata kriya sendiri di Jawa Barat terdapat beberapa kota yang menghasilkan produk industri kreatif diantaranya Kota Tasikmalaya dengan produk andalannya yaitu payung geulis, sandal kelom, batik, anyaman mendong. Kabupaten Garut dengan produk tas, sepatu, jaket dengan bahan dasar kulit dan lain sebagainya. Selain wisata yang penulis sebutkan diatas masih banyak destinasi wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan potensi yang sangat besar baik itu dalam segi kunjungan wisatawannya maupun dalam segi ekonominya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wisatawan di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2013**

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Jiwa)
1.	2010	25.878.118
2.	2011	36.648.532
3.	2012	44.663.441
4	2013	47.330.580

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wisatawan di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa pariwisata dapat memberikan keuntungan baik bagi wisatawan yang berkunjung, maupun pihak swasta atau pemerintah daerah yang mengelola pariwisata tersebut. Kenaikan jumlah wisatawan ini hendaknya di respon positif karena sektor pariwisata

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor sosial dan ekonomi. Peningkatan pariwisata akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah, pemasukan devisa lewat wisatawan mancanegara, dan lain-lain sehingga perlunya peningkatan fasilitas penunjang pariwisata.

Pariwisata merupakan suatu industri yang bergantung pada jumlah kedatangan para wisatawan. Dengan hal itu pengelolaan dan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) harus ditata dan dikelola dengan baik. Di era saat ini, sektor pariwisata menjadi sektor potensial dalam mendongkrak salah satu sumber penerimaan daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya potensial pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Hunian Hotel di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2013**

No.	Tahun	Tingkat Hunian Hotel (%)
1.	2010	46,56
2.	2011	40,09
3.	2012	43,19
4	2013	42,00

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Hunian Hotel di Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel di jawa barat tidak selamanya mengalami kenaikan dikarenakan beberapa faktor seperti kunjungan wisatawan.

Setiap tahunnya kunjungan wisatawan di Jawa Barat selalu mengalami kenaikan tetapi tidak di barengi dengan penambahan jumlah tingkat hunian hotel.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Rumah Makan atau Restoran di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2013**

No.	Tahun	Jumlah Rumah Makan atau Restoran
1.	2010	3.240
2.	2011	3.364
3.	2012	3.364
4.	2013	3.364

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat*

Rumah makan atau Restoran adalah salah satu fasilitas penunjang pariwisata yang wajib ada pada suatu wilayah, dimana fasilitas tersebut berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayah tersebut. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Makan atau Restoran di Provinsi Jawa Barat terus meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Pendapatan asli daerah merupakan suatu cermin kemandirian daerah dalam penerimaan yang dihasilkan dari pemanfaatan potensi daerah sesuai undang-undang yang berlaku seperti pendapatan melalui pajak, retribusi, hasil pengolahan keuangan daerah yang dipisahkan sefrta pendapatan lain-lain yang sah. Salah satu upaya pengoptimalan pendapatan daerah adalah dengan cara pengembangan sektor-sektor potensial yang ada salah satunya potensi pariwisata. Kabupaten dan kota di Jawa Barat pada umumnya memiliki potensi pariwisata yang sangat baik, jika sektor wisata dapat dikembangkan maka akan memberikan pengaruh yang besar pada peningkatan pendapatan daerah

**Tabel 1.4**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2013**

No.	Tahun	PAD Jawa Barat (Ribu Rupiah)
1.	2010	7.252.242.913.000
2.	2011	8.502.643.155.486
3.	2012	9.982.917.415.000
4.	2013	12.360.109.870.000

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat*

Pada tabel diatas menunjukkan pendapatan asli daerah di provinsi Jawa barat dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan serta penurunan

Menurut Spillane (1994) menyatakan bahwa luas pariwisata dapat dilihat sebagian kegiatan pengembangan potensi destinasi wisata serta kawasan-kawasan wisata potensial secara berkelanjutan dan kegiatan yang multidimensi pada proses pembangunan. Dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di tunjukkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dala rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan destinasi dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, serta Jumlah Rumah Makan atau Restoran. Maka dari itu penulis memilih Judul

**“Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019”** pada penelitian kali ini.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel serta Jumlah Restoran dan Rumah Makan secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, serta Jumlah Restoran dan Rumah Makan secara Bersama-Sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, serta Jumlah Restoran dan Rumah Makan secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, serta Jumlah Restoran dan Rumah Makan secara Bersama-Sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menembah wawasan pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam penerimaan daerah sektor pariwisata dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mendukung serta membuat kebijakan dalam mengembangkan pariwisata di Provinsi Jawa barat.
3. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dasar pertimbangan dalam kepentingan perumusan yang relevan.

## **1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan mengakses website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2018 diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan. Berikut Matriks jadwal penelitian penulis.





